

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 792/ Pendidikan Luar Sekolah

LAPORAN AKHIR TAHUNAN  
PENELITIAN DOSEN PEMULA



PEMANFAATAN POTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM  
PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL  
PADA MASYARAKAT PERDESAAN  
DI KABUPATEN JEMBER

PENELITI

DEDITIANTI TRI INDRIANTI, S.Pd.,M.Sc  
NIDN: 0017057912

UNIVERSITAS JEMBER  
November 2014

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan .....	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>4</b>
2.1 Program Keaksaraan Fungsional Sebagai Upaya Penyadaran Kritis .....	4
2.2 Potensi Kelembagaan Lokal pada Masyarakat Perkebunan....	5
2.3 Penelitian yang Sudah Dilakukan Sebelumnya di Indonesia...	6
2.4 Penelitian yang Direncanakan oleh Peneliti.....	6
<b>BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
3.1 Tujuan Penelitian .....	7
3.2 Manfaat Penelitian.....	7
3.3 Luaran Penelitian.....	7
<b>BAB 4. METODE PENELITIAN</b>	<b>8</b>
4.1 Metode Dasar.....	8
4.2 Lokasi Penelitian .....	8
4.3 Rancangan Penelitian.....	8
4.4 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian .....	9
4.5 Teknik Pengumpulan Data .....	9
4.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	9
4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	10
<b>BAB 5. HASIL YANG DICAPAI</b>	<b>11</b>
5.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	11
A. Keadaan Geografis Kecamatan Sumber Sari.....	11
B. Data Kependudukan Kelurahan Antirogo.....	12
C. Pendidikan .....	14
D. Kondisi Sosial Ekonomi Kelurahan Antirogo.....	17
5.2 Potensi Kearifan Lokal di Kelurahan Antirogo.....	18
A. Lembaga Formal.....	18
B. Gotong Royong.....	19
C. Pengajian/sarowaan .....	21
5.3 Pemanfaatan Potensi Lokal.....	23
A. Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional.....	25
B. Proses Pembelajaran Program Keaksaraan Fungsional .....	27
1. Metode Pembelajaran Program Keaksaraan Fungsional.....	27

2.	Media Pembelajaran Program Keaksaraan Fungsional.....	29
3.	Materi Pembelajaran.....	30
4.	Tutor Program Keaksaraan Fungsional.....	31
5.	Evaluasi Program Keaksaraan Fungsional .....	32
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keaksaraan Fungsional	32
a.	Akses Masyarakat.....	32
b.	Partisipasi Masyarakat.....	34
c.	Kontrol Masyarakat.....	35
d.	Manfaat Program Keaksaraan bagi Masyarakat .....	35
5.5	Kompetensi Masyarakat Dalam Program Keaksaraan Fungsional ....	36
5.6	Peran Organisasi Masyarakat dalam Program Keaksaraan Fungsional	39
BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....		40
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....		41
7.1	Kesimpulan .....	41
7.2	Saran.....	42

**DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1: Justifikasi Anggaran**

**Lampiran 2: Biodata Peneliti**

**Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesanggupan Peneliti**

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk merumuskan pola pendidikan keaksaraan fungsional dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal pada masyarakat perdesaan di Kabupaten Jember. Fokus kajian penelitian dilatarbelakangi adanya kondisi bahwa masyarakat perdesaan merupakan penyandang buta aksara terbesar di Kabupaten Jember. Disisi lain proses pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan hanya mengenalkan huruf dan angka saja. Oleh karena itu, perlu cara yang tepat dan mendasar sebagai bentuk percepatan pemberantasan buta aksara yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat. Pola pendidikan keaksaraan fungsional yang dihasilkan dari kegiatan penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi aplikatif bagi para penentu kebijakan guna mengurangi dan menuntaskan jumlah buta aksara di Kabupaten Jember, terutama pada masyarakat perdesaan.

Data penelitian yang dikumpulkan pada kegiatan penelitian ini bersifat primer dan skunder, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta pengamatan terlibat. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara terstruktur melalui diskusi kelompok (*Fokus Group Discussion*). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya berbagai potensi sumberdaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan program keaksaraan fungsional di Kabupaten Jember. Mengingat kegiatan program keaksaraan fungsional tidak dapat dilakukan secara sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Untuk itu perlu adanya penyelenggaraan kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional yang sesuai dengan potensi di tingkat lokal agar kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan.

**Kata kunci:** *Kearifan Lokal, Keaksaraan Fungsional, Masyarakat Perdesaan*

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Selama ini program pendidikan keaksaraan fungsional masih diyakini sebagai salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah ketidakberdayaan masyarakat akibat kurangnya ilmu pengetahuan (*lack of intelligence*). Dimana dasar ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengenalan aksara sebagai modal memperkaya konsep diri. Untuk itu, pelaksanaan program pendidikan keaksaraan fungsional dilakukan dengan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam aspek: berbicara, mendengar, membaca, menulis dan berhitung (bingarcalistung). Tujuannya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan akses yang berpengaruh terhadap sumber kebutuhan hidup, agar terwujud masyarakat berdaya dan sejahtera.

Namun, proses pembelajaran yang diterapkan pada program pendidikan keaksaraan fungsional selama ini hanya mengenalkan huruf dan angka saja. Akibatnya pembelajaran tidak menarik bagi warga belajar. Kondisi tersebut dapat dilihat dari menurunnya kehadiran serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini, menuntut pelaku pendidikan untuk menemukan inovasi dan strategi pembelajaran yang lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup warga belajar. Mengingat, warga belajar program keaksaraan fungsional adalah orang dewasa yang belajar jika merasa butuh. Disisi lain, masyarakat memiliki kearifan lokal yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan dan dikembangkan

Sebagaimana kondisi di Kabupaten Jember, yang sejak tiga tahun terakhir ditetapkan sebagai daerah yang memiliki penyandang buta aksara tertinggi di Indonesia sejumlah 1.945.600 jiwa (Laporan USAID-DBE1, 2011). Disisi lain Kabupaten Jember merupakan daerah yang subur dan strategis. Namun, sebagian masyarakatnya masih belum memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lain yang tersedia. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat, masyarakat Kabupaten Jember sebagian besar tinggal didaerah pedesaan dengan berbagai kearifan lokal

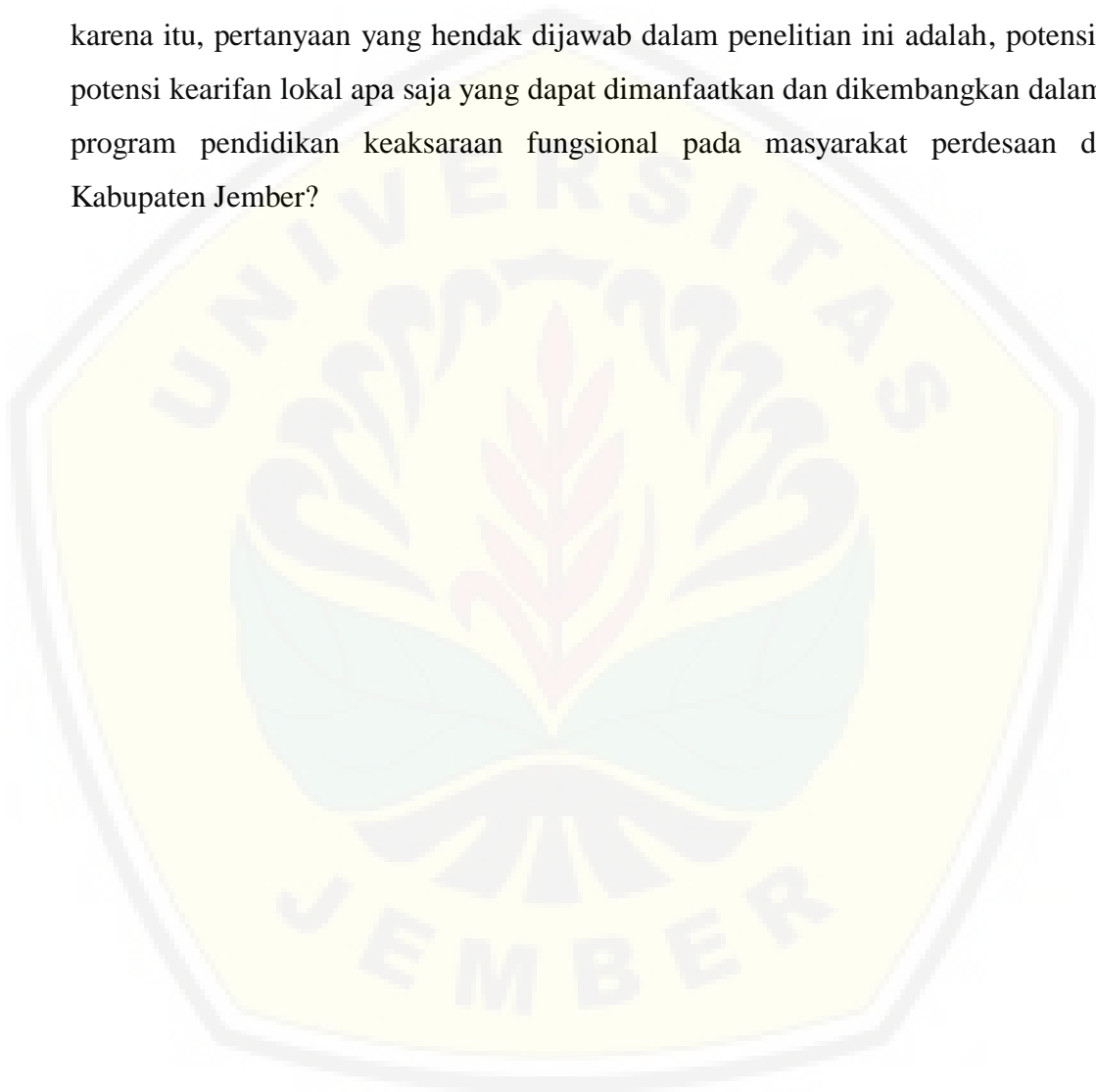
Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2013 menghasikan, bahwa terdapat kearifan lokal masyarakat dalam bentuk tatanan sosial sebagai wujud strategi adaptasi menghadapi kemiskinan. Untuk itu, kegiatan pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional tidak hanya menekankan aspek bingarcalistung, tetapi lebih pada memberikan materi pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi kehidupan warga belajar. Terutama untuk menanggulangi masalah kemasyarakatan. Untuk itu, tingkat keberhasilan program pendidikan keaksaraan fungsional tidak lagi diukur dari kemampuan warga belajar dalam menggunakan keterampilan bingarcalistung. Akan tetapi lebih dilihat dari kemampuan berfikir kritis guna memecahkan masalah dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal.

Ironisnya hal tersebut belum menjadi tolak ukur keberhasilan program. Bahkan, potensi lokal dalam masyarakat belum menjadi fokus perhatian pemerintah serta belum menjadi indikator utama dampak program. Perhatian ini berguna sebagai dasar mengembangkan program pemberantasan buta aksara guna meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui gerakan kritis transformatif. Mengingat, masyarakat memiliki tatanan sebagai wujud interkoneksi antara berbagai sendi kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amin (2005:172), bahwa masyarakat yang mendiami suatu bentang ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, semuanya mesti dilihat dari satu kesatuan. Dimana, keberadaan lembaga sosial dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan mampu menjamin stabilitas kelangsungan hidup masyarakat karena terbentuk atas kepentingan kolektif yang sesuai norma dan karakteristik masyarakat di tingkat lokal.

Dari uraian di atas tergambar bahwa program pendidikan keaksaraan sebagai gerakan untuk mempercepat pemberantasan aksara perlu dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Mengingat masyarakat perdesaan memiliki berbagai tatanan sebagai bentuk strategi adaptasi dalam menghadapi berbagai masalah kemasyarakatan. Untuk itu perlu adanya strategi baru dalam memberantas buta aksara yang sesuai dengan tatanan masyarakat lokal.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak mengkaji pemanfaatan potensi kearifan lokal dalam masyarakat perdesaan. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk memformulasi pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional sebagai bentuk program pemberantasan buta aksara terhadap masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah, potensi-potensi kearifan lokal apa saja yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam program pendidikan keaksaraan fungsional pada masyarakat perdesaan di Kabupaten Jember?





## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pendidikan Keaksaraan Fungsional Sebagai Upaya Penyadaran Kritis

Buta aksara dan ketidakberdayaan perempuan buruh perkebunan merupakan masalah kemanusiaan terkait kemiskinan. Oleh karena itu, perlu kebijakan komprehensif dan menyeluruh yang dilakukan secara regional maupun nasional guna menyelesaikan akar penyebab masalah tersebut. Tujuannya, membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kritis dan mampu merespon situasi yang berpengaruh sebagai sumber-sumber kelangsungan hidup serta mampu melakukan pembacaan kondisi sosial disekitarnya. Pembacaan tersebut merupakan instrumen dalam memperbaiki kehidupan.

Bagi Freire (dalam Smith:2001), bahwa upaya penyadaran pada akhirnya bermuara pada pembebasan yang diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial, wawasan kebangsaan, dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program pendidikan keaksaraan fungsional, sebagai program pemberdayaan yang mengkombinasikan kegiatan belajar bingarcalistung (berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berhitung), dan keterampilan fungsional. Tujuan program keaksaraan fungsional mengupayakan kemampuan pemahaman dan penyesuaian diri guna mengatasi masalah hidup serta membangun masyarakat untuk melakukan perubahan.

Untuk itu, pendidikan keaksaraan fungsional perlu dilihat, dianalisis, dan dipahami dalam kerangka penyadaran kritis. Dimana terdapat perubahan dari situasi kehidupan masyarakat parsial menuju kehidupan yang berencana (*planning society*). Menurut Sudjana (2004: 279) ciri masyarakat belajar adalah: *pertama*, masyarakat gemar mencari informasi guna memenuhi kehidupannya. *Kedua*, masyarakat gemar menemukan informasi. *Ketiga*, masyarakat gemar menulis dan menyampaikan informasi, dan *keempat* masyarakat gemar melakukan kegiatan belajar secara berkelanjutan atas kesadaran bahwa belajar bagian dari kehidupan, sehingga perlu proses pembelajaran yang responsif dan sesuai konteks social.



## 2.2 Potensi Kearifan Lokal pada Komunitas Masyarakat Perdesaan

Komunitas lokal memiliki kelembagaan yang berpotensi terhadap akses sumber ekonomi serta memiliki perangkat institusi sosial yang melembaga sebagai wujud kecerdasan lokal (*local genius*) dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dikatakan Sugiyanto (2002:27), bahwa tatanan masyarakat tumbuh akibat tingkahlaku yang diulang guna menuhi kebutuhan dan melekat pada pola kehidupan masyarakat. Dimana keberadaan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal dapat membangkitkan martabat kaum lemah, menghambat internalisasi ketidakadilan, dan menciptakan berbagai saluran bagi kelompok terpinggir untuk bersuara dan membuat perubahan yang berarti (Anonim: 2006:79). Oleh karena itu kelembagaan masyarakat efektif guna meningkatkan keberdayaan masyarakat pada umumnya.

Menurut Sugiyanto (2002:38) kelembagaan masyarakat diartikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dan memiliki anggota yang berkembang secara dinamis melalui dimensi kehidupan masyarakat. Secara abstrak lembaga sosial merupakan peraturan atau norma untuk mengatur persoalan dan perilaku anggotanya. Koentjaraningrat dalam Soekanto (1990: 217), mengatakan lembaga masyarakat sebagai sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Kelembagaan masyarakat pada umumnya terbentuk dari ikatan sosial guna menciptakan kesepakatan sosial yang mengikat.

Oleh karena itu, kelembagaan masyarakat ditingkat lokal penting untuk dipertimbangkan guna dijadikan sarana melakukan penyadaran terhadap masyarakat perdesaan. Dimana penyadaran dilakukan sebagai awal guna memberikan kapasitas untuk kemudian didayagunakan dalam melakukan akses terhadap berbagai sumber kehidupan. Untuk itu, dalam penelitian ini tergambar pentingnya program pendidikan keaksaraan fungsional berbasis komunitas lokal yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat guna menyelesaikan masalah kemiskinan pada masyarakat perdesaan. Dimana kompleksitas interaksi sosial dan alam dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan pola fenomenal dan spesifik lokal, sehingga masyarakat perdesaan menjadi manusia kritis dan menjadi lebih peka dalam menghadapi berbagai tekanan sosial.

### **2.3. Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya Adalah Sebagai Berikut:**

1. Santosa, dkk (2007), Penyelenggaraan Keaksaraan Perspektif Gender Berbasis Keluarga. Penelitian tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran gender dalam keluarga.
2. Supriyanto, dkk (2007). Model Pemberdayaan Kelompok Nelayan Produktif melalui Penguatan kelompok Usaha bersama. Penelitian tersebut memfokuskan kegiatan pendidikan keaksaraan melalui pemanfaatan kelompok usaha dalam memberdayakan nelayan.
3. Sariono (2002), meneliti keberdayaan perempuan melalui pengembangan peningkatan ekonomi guna membentuk kemandirian perempuan. Menurutnya upaya tersebut dapat membangun kekuatan *civil society*. Penelitian tersebut menekankan pada otonomi pengambilan keputusan. Hasilnya, bahwa perempuan membutuhkan perhatian serta kearifan budaya, dan dukungan semua pihak untuk dapat berdaya. Tanpa itu, perempuan sulit berdaya.

### **2.4. Penelitian Yang Direncanakan Oleh Peneliti Adalah:**

Penelitian ini direncanakan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukenali bentuk kearifan masyarakat pada komunitas di tingkat lokal yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dalam program pendidikan keaksaraan guna menyelesaikan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat perdesaan.

## BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap data guna menemukenali kearifan masyarakat ditingkat lokal untuk kemudian dimanfaatkan dalam memformulasi program pendidikan keaksaraan yang sesuai dengan tatanan masyarakat di tingkat lokal. Data tersebut dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pemberantasan buta aksara yang dilakukan melalui program pendidikan keaksaraan fungsional pada masyarakat perdesaan. Mengingat, selama ini proses pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan fungsional hanya mengenalkan persoalan huruf dan angka saja.

### 3.2 Manfaat Penelitian

Dari latar belakang di atas, penelitian ini mengandung tujuan, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia dalam merumuskan strategi pendidikan aksara fungsional berbasis kearifan masyarakat di tingkat lokal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara aktual dan penting, mengenai potensi kearifan masyarakat di tingkat lokal dalam memberantas buta aksara guna mewujudkan keberdayaan masyarakat.

### 3.3 Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan *out put* berupa referensi aplikatif strategis dalam memformulasi program pendidikan keaksaraan fungsional pada masyarakat perdesaan dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal berupa pengayaan *handout* materi kuliah. Dalam upaya mendukung sosialisasi dan hasil penelitian ini agar dapat diketahui khalayak umum, maka hasil penelitian akan diterbitkan dalam Jurnal Visi yang sudah terakreditasi secara nasional dan *poster* sebagai bentuk sosialisasi temuan penelitian.

## BAB 4. METODE PENELITIAN

### 4.1. Metode Dasar

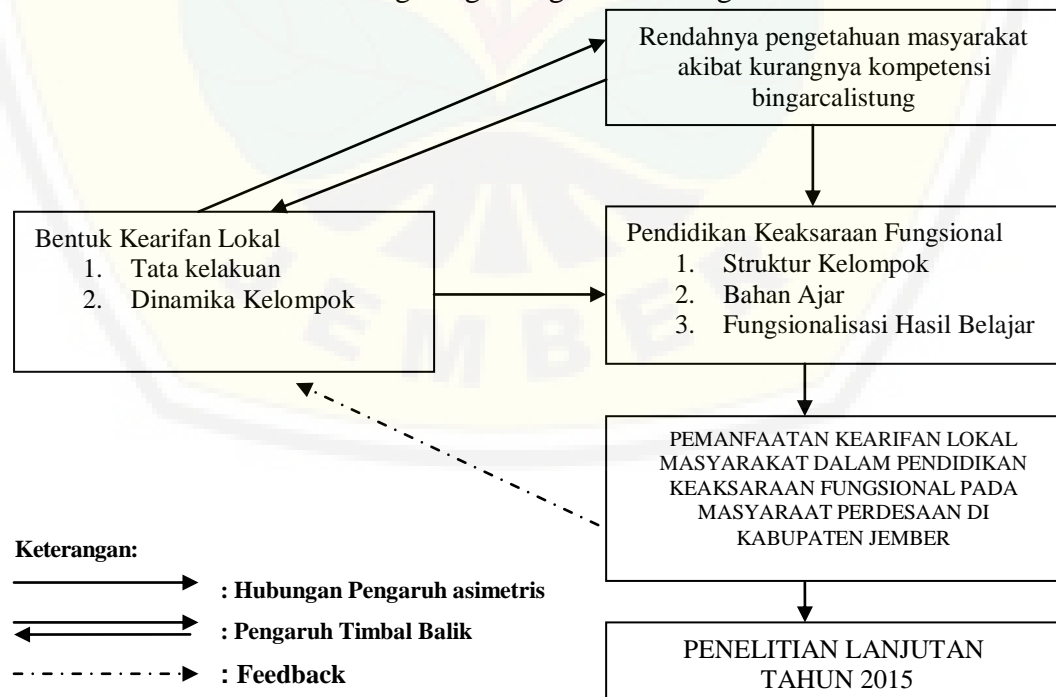
Kerangka besar penelitian ini menggunakan *deskriptif eksplanasi* dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh metode *survey*.

### 4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi didasarkan pada data yang dihimpun BPS dan Bappeda Jember, bahwa Kecamatan Sumbersari merupakan daerah perdesaan yang masih terdapat kantong-kantong penyandang buta aksara terbesar di Kabupaten Jember (Jember dalam angka: 2011). Namun, memiliki potensi kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi adaptasi dalam menanggulangi masalah kemasyarakatan.

### 4.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan bagan alir sebagaiberikut:



**Gambar 4.1. Rancangan Penelitian**

## 4.4 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *snowball*. Dimana informan diambil secara keseluruhan dengan kategori masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

## 4.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

1. Wawancara dan FGD, pertanyaan yang diajukan kepada informan guna menggali informasi bentuk dan potensi kearifan lokal masyarakat perdesaan.
2. Observasi, dilakukan untuk mengamati bentuk kearifan lokal yang potensial untuk kemudian dimanfaatkan sebagai dasar memformulasi pemberantasan buta aksara pada masyarakat perdesaan.
3. Pencatatan laporan atau dokumentasi yang berhubungan dengan gambaran kondisi masyarakat perdesaan dan keadaan geososial Kabupaten Jember.
4. Studi pustaka, data yang diperoleh dari referensi buku yang terkait dengan tujuan penelitian.

## 4.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel yang menjadi fokus kajian, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan keaksaraan Fungsional adalah pendekatan pembelajaran yang ditujukan pada warga belajar untuk mengembangkan kemampuan berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berhitung serta berorientasi pada kehidupan sehari-hari.
2. Kearifan lokal adalah bentuk tatanan masyarakat yang telah terorganisir dan potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan guna menyusun pola pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan fungsional guna memberantas buta aksara pada masyarakat perdesaan.

## **4.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data primer dan skunder terkumpul, maka dilakukan:

### **A. Pengolahan data**

Secara keseluruhan data yang didapat melalui metoda wawancara dan FGD diolah dengan teknik *triangulasi sumber dan triangulasi teknik*.

### **B. Teknik Analisis data**

Setelah data primer maupun sekunder terkumpul, maka langkah pertama adalah melakukan analisis data dengan teknik triangulasi. Dimana teknik triangulasi digunakan untuk menganalisa data bentuk komunitas yang terdapat di masyarakat perdesaan yang potensial untuk dijadikan dasar pelaksanaan program pendidikan keaksaraan fungsional.

## BAB 5. HASIL YANG DICAPAI

### 5.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

#### A. Keadaan Geografis Kecamatan Sumpalsari

Secara astronomis Kabupaten Jember berada pada titik koordinat  $6^{\circ}27'9''$  sampai dengan  $7^{\circ}14'35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}59'6''$  sampai dengan  $8^{\circ}33'56''$  Lintang Selatan. Disisi lain Kabupaten Jember dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas wilayah karena memiliki karakter topografi berbukit hingga pegunungan disisi utara dan timur. Akan tetapi di daerah selatan dan tengah merupakan dataran ngarai yang subur. Luas wilayah yang dimilikinya sebesar 3.293,34 Km<sup>2</sup> atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi wilayah, bagian selatan merupakan dataran rendah yang relarif subur untuk pengembangan tanaman pangan. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Jember memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi sumber bagi kehidupan masyarakat.

Namun demikian, tidak seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Jember memiliki kesuburan dan potensi daerah yang sama. Seperti kondisi wilayah di Kecamatan Sumpalsari yang secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten Jember, dan terletak di pusat kota Kabupaten Jember. Dimana terdapat berbagai potensi sumberdaya alam yang masih dapat dikembangkan secara optimal bagi sumber kehidupan masyarakat. Mengingat, Kecamatan Sumpalsari, khususnya Kelurahan Antirogo berada pada posisi yang strategis untuk mengembangkan potensi wilayah, karena berada dipusat kota dan berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali. Letak wilayah tersebut secara langsung berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat yang cukup pesat untuk menjadi barometer pertumbuhan berbagai sektor sosial, ekonomi, maupun budaya. Selain itu, wilayah pusat Kabupaten Jember dikategorikan menjadi tiga, antara lain:

- Wilayah pegunungan terdiri 3,45% yang berada di sebelah utara pusat kota
- Wilayah perbukitan terdiri 3,33% yang berada di bagian tengah pusat kota
- Wilayah daratan terdiri 93,22% disebelah timur laut pusat kota



## B. Data Kependudukan Kelurahan Antirogo

Pada dasarnya Kabupaten Jember tidak memiliki penduduk asli, dan hampir semua pendatang. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Jember merupakan daerah yang mengalami perkembangan cukup pesat khususnya dibidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari sumber penghidupan. Namun demikian, mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan komposisi penduduk dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan (*migrasi*). Adapun komposisi penduduk berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah penduduk Kelurahan Antirogo tercatat sebanyak 10.341 jiwa, terdiri atas 5.407 jiwa perempuan dan 4.935 jiwa laki-laki, dengan rasio 91,27, dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.322,38 jiwa/Km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kelurahan Antirogo adalah 7,82 Km<sup>2</sup>.

Di sisi lain, Kelurahan Antirogo dibagi menjadi 4 lingkungan, yakni Lingkungan Krajan, Lingkungan Trogowetan, Lingkungan Plinggian, dan Lingkungan Jambuan. Data dari kantor Kelurahan Antirogo juga menyebutkan data kependudukan Kelurahan Antirogo mulai tahun 2010 hingga 2013. Data tersebut meliputi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jumlah penduduk berdasarkan gender.

**Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No.	Indikator	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
1.	0 – 12 tahun	127 orang	135 orang	143 orang	155 orang
2.	> 1 - < 5 tahun	628 orang	672 orang	716 orang	761 orang
3.	> 5 - < 7 tahun	235 orang	257 orang	279 orang	304 orang
4.	> 7 - < 15 tahun	1255 orang	1362 orang	1469 orang	1579 orang
5.	> 15 – 56 tahun	6037 orang	6152 orang	6267 orang	6387 orang
6.	> 56 tahun	1570 orang	1682 orang	1794 orang	1909 orang

Sumber : Profil Kelurahan Antirogo Tahun 2013

Tabel 5.1 menyatakan bahwa penduduk Kelurahan Antirogo dengan usia produktif (15 – 56 tahun) merupakan komposisi terbesar dalam masyarakat yakni sekitar 58%. Hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun data tersebut juga dapat menjadi *demographic disaster* apabila tidak ditunjang dengan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang memadai bagi kelompok usia produktif tersebut. Rata-rata pertambahan penduduk yang paling tinggi terdapat pada usia produktif dimana pertambahannya mencapai 0,9%. Data tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemegang kebijakan di Kelurahan Antirogo untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut.

**Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender**

No.	Indikator	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk	10.327 orang	11.120 orang	11.176 orang	11.200 orang
2.	Jumlah Laki-laki	4.251 orang	4.550 orang	4.550 orang	4.560 orang
3.	Jumlah Perempuan	6.076 orang	6.570 orang	6.626 orang	6.640 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	7.680 KK	7.980 KK	7.980 KK	7.980 KK

Sumber : Profil Kelurahan Antirogo Tahun 2013

Dari Tabel 5.2 dapat terlihat bahwa jumlah *Sex Ratio* penduduk Kelurahan Antirogo rata-rata sebanyak 69. Artinya setiap 100 perempuan terdapat 69 laki-laki. Sebagaimana bahwa *Sex ratio* berguna untuk meningkatkan pembangunan yang berwawasan gender. Hal ini dapat dijadikan sebuah acuan untuk meningkatkan program pemberdayaan terhadap perempuan yang masih memiliki potensi sebagai penyanggah ekonomi keluarga.

Selain itu, data kependudukan lainnya menyatakan bahwa 60% kondisi ekonomi rumah tangga di Kelurahan Antirogo masih dikategorikan rumah tangga miskin. Hal ini dipertegas oleh pernyataan PM selaku ketua Rukun Tetangga dan HM Arifin Noer sebagai Kepala Lingkungan Plinggian, bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Antirogo masih miskin. Namun, jika dihitung berdasarkan data statistik bahwa dalam waktu 4 tahun terakhir terdapat sekitar 4.788 KK yang merupakan kategori rumah tangga miskin.

## C. Pendidikan

Secara kualitas, sumberdaya manusia di Kelurahan Antirogo relatif rendah dibandingkan daerah lain yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Sumpalsari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3  
Banyaknya Penduduk Usia 5 tahun ke Atas Berdasarkan Kemampuan Berbahasa Indonesia

No	Kelurahan	Kemampuan Berbahasa Indonesia	
		Mampu	Tidak mampu
1	Kranjingan	11.663	1.084
2	Wirolegi	9.862	1.276
3	Karangrejo	13.533	982
4	Kebonsari	25.660	426
5	Sumpalsari	33.269	428
6	Tegalgede	7.893	590
7	Antirogo	7.504	1.634
	Jumlah	109.384	6.420

Sumber: Sumpalsari dalam angka, 2013

Dari tabel 5.3 terlihat bahwa masih banyak ditemukan masyarakat di Kelurahan Antirogo yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk melakukan akses informasi relatif kurang. Mengingat berbagai informasi selalu disajikan dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini juga berdampak pada pemenuhan masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Kualitas sumberdaya manusia juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Antirogo. Dimana sebagian besar masyarakat di Antirogo hanya memperoleh pendidikan rendah. Sebagaimana data yang dihimpun oleh BPS 2013 bahwa, masih terdapat 2.194 jiwa yang tidak/ belum pernah sekolah. Bahkan yang memiliki pendidikan SLTA/ sederajat hanya 673 jiwa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, berdampak pada kemiskinan bagi sebagian besar warga masyarakat. Mengingat, rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap rendahnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan politik. Dimana kondisi tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga

Untuk itu perlu diselenggarakan berbagai program pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai bekal hidup. mengingat sebgaaian besar masyarakat di Kelurahan Antirogo belum mendapat akses pendidikan formal yang maksimal. Untuk itu, perlu diselenggarakan pendidikan nonformal yang dapat menjadi pelengkap, penambah, maupun pengganti pendidikan formal guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut bermanfaat dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan memadai dalam memasuki pasar kerja. Salah satu program pendidikan non formal antara lain adalah program pendidikan keaksaraan fungsional yang sesuai yang dengan potensi lokal. Harapannya masyarakat melalui program pendidikan tersebut, masyarakat dapat mengelola potensi lokal secara maksimal.

Dalam hal ini program pendidikan keaksaraan fungsional tepat untuk diselenggarakan di Kelurahan Antirogo. Mengingat secara astronomis maupun geografis Kelurahan Antirogo berada di pusat kota Kabupaten Jember. Namun, masih terdapat kantong kemiskinan. Dimana pendidikan merupakan hal yang sangat vital bagi perkembangan sosial masyarakat. Keadaan masyarakat yang sesungguhnya bisa dilihat dari kualitas pendidikan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dalam proses pendidikan. Berikut data mengenai keadaan pendidikan di Kelurahan Antirogo.

**Tabel 5.4 Keadaan Pendidikan di Kelurahan Antirogo**

No.	Indikator	Sub Indikator	Jumlah		
			2011	2012	2013
1.	Pendidikan penduduk usia 5 tahun keatas	Jumlah penduduk buta huruf	150 orang	100 orang	88 orang
		Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	200 orang	200 orang	190 orang
		Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	240 orang	240 orang	250 orang
		Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	230 orang	250 orang	255 orang
		Jumlah penduduk tamat	105 orang	125 orang	130 orang

		SLTA/ sederajat			
		Jumlah penduduk tamat D1	5 orang	10 orang	6 orang
		Jumlah penduduk tamat D2	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah penduduk tamat D3	15 orang	27 orang	12 orang
2.	Wajib Belajar 9 tahun dan putus sekolah	Jumlah usia 7 – 15 tahun masih sekolah	222 orang	238 orang	315 orang
		Jumlah usia 7 – 15 tahun putus sekolah	0 orang	0 orang	20 orang
3.	Prasarana pendidikan	Jumlah SLTA/ sederajat	2 buah	3 buah	3 buah
		Jumlah SLTP/ sederajat	3 buah	4 buah	4 buah
		Jumlah SD/ sederajat	6 buah	6 buah	6 buah
		Lembaga Pendidikan Agama	2 buah	2 buah	2 buah
		Lembaga Pendidikan Lain (kursus/ sejenis)	0	0	0

*Sumber : Profil Kelurahan Antirogo Tahun 2013*

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Antirogo masih relatif rendah. Angka putus sekolah juga terlihat cukup tinggi dimana pada tahun 2011 – 2012 tidak terdapat siswa yang putus sekolah. Namun di tahun 2013, angka putus sekolah melonjak sebanyak 20 orang. Meskipun sistem pendidikan telah didukung oleh jumlah sekolah yang secara kuantitas cukup memadai, namun angka partisipasi sekolah masih rendah. Selain itu, jumlah masyarakat yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pasca lulus dari sekolah menengah juga masih relatif sedikit.

Tabel 5.4 juga menunjukkan bahwa penyandang buta aksara sebanyak 88 orang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan data yang dihimpun oleh BPS 2013 yang menyatakan bahwa penyandang buta aksara di wilayah Kelurahan Antirogo lebih dari 1.100 orang. Selain itu, tingginya problematika mengenai pendidikan, baik anak putus sekolah maupun penyandang buta aksara juga belum terlihat dari adanya pendidikan alternatif di wilayah Kelurahan Antirogo yang dapat menjadi pemicu rendahnya sumberdaya manusia.

## D. Kondisi Sosial Ekonomi Kelurahan Antirogo

Tingginya usia produktif di wilayah Kelurahan Antirogo merupakan tantangan bagi masyarakat Kelurahan Antirogo untuk bersaing dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber ekonomi. Data di bawah ini menunjukkan gambaran keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Antirogo. Sebagaimana terlihat pada tabel 5.5 bahwa jumlah usia produktif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tersedia.

**Tabel 5.5 Keadaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Antirogo**

No.	Indikator	Jumlah		
		2011	2012	2013
1.	Jumlah penduduk usia kerja (15 – 56 tahun)	1.381 orang	1.381 orang	1.390 orang
2.	Jumlah penduduk usia 15 – 56 tahun yang tidak bekerja	1.500 orang	1.500 orang	1.450 orang
3.	Penduduk wanita usia 15 – 56 tahun menjadi ibu rumah tangga	4.500 orang	4.561 orang	4.622 orang
4.	Penduduk usia > 15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	36 orang	36 orang	38 orang

*Sumber : Profil Kelurahan Antirogo Tahun 2013*

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari total masyarakat usia produktif di Kelurahan Antirogo masih sedikit masyarakat yang terserap di dunia kerja. Sebagaimana tersaji pada data statistik bahwa, jumlah usia produktif mencapai 6.387 orang. Namun, jumlah penduduk usia produktif yang bekerja hanya sekitar 21,7% dan sisanya adalah pengangguran.

Disisi lain masih banyak potensi sumberdaya alam yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum berbanding dengan kompetensi yang dimiliki masyarakat sebagai pengelolanya. Untuk itu, adanya pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan tidak hanya memberikan pengetahuan aksara dan angka. Akan tetapi, program tersebut diharapkan lebih memperhatikan potensi masyarakat yang berpotensi sebagai sumber ekonomi.



## 5.2 Potensi Kearifan Lokal di Kelurahan Antirogo

Meskipun memiliki sejumlah problem sosial yang cukup kompleks, masyarakat di Kelurahan Antirogo memiliki bentuk budaya bermacam-macam berdasarkan pembagian lingkungan yang menjadi potensi Kelurahan Antirogo. Lingkungan Krajan berkembang kesenian Hadrah, di Trogo Wetan ada Jangir (semacam jaranan), di Jambuan ada kelompok Reog dan Janger, serta di Dusun Plinggian terdapat macan-macanan.

Selain sektor kesenian, pertanian merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Antirogo. Komoditas pertanian di Kelurahan Antirogo bermacam-macam meliputi tembakau sebagai komoditas unggulan serta padi, jagung, cabe, selada, serta kacang panjang. Selain bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Kelurahan Antirogo juga mengembangkan sektor industri rumah tangga yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam sekitar, antara lain: industri kerajinan bambu, industri rambut palsu serta pengusaha tempe dan tahu. Akan tetapi, home industri kerajinan bambu industri unggulan di antirogo. Industri tersebut mampu menembus pasar internasional.

Selain itu, terdapat banyak kearifan lokal yang terdapat di Kelurahan Antirogo baik itu kearifan dalam bentuk sosial, budaya, politik, maupun sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam program keaksaraan fungsional antara lain sebagai berikut:

### A. Lembaga Formal

PKK dan Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan lembaga formal bentukan pemerintah di Kelurahan Antirogo berjalan secara aktif. Keberadaan kedua lembaga ini memiliki peran vital dalam memberikan pembekalan ketrampilan maupun maupun pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Sebagai perangkat organisasi pemerintahan, PKK memiliki program kerja yang disebut dasa wisma. Pertemuan rutin PKK dilakukan sebulan sekali. Anggota PKK adalah ibu-ibu dan kaum perempuan. Dalam pertemuan tersebut juga diadakan arisan sebagai pengikat keanggotaan. Sebagian besar perempuan di Kelurahan Antirogo mengungkapkan nilai manfaat untuk menjadi anggota PKK,



adalah menambah pengalaman dan keterampilan. Keuntungan lain adalah untuk beraktivitas, tukar-pikiran, dan saling menolong di antara anggota jika ada yang menghadapi kesulitan. Mereka yang sedang menghadapi persoalan bisa meminta bantuan pemikiran ataupun bantuan tenaga serta finansial kepada anggota lain sebagai wujud solidaritas antar anggota.

Selain organisasi PKK, di Kelurahan Antirogo juga terdapat Posyandu untuk membantu kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Kelurahan Antirogo memiliki tiga tempat Posyandu. Setiap Posyandu ditangani oleh lima orang kader, yaitu satu orang sebagai ketua, satu orang sebagai wakil, satu orang sebagai bendahara, dan dua orang sebagai anggota. Jumlah keseluruhan kader posyandu di Kelurahan Antirogo sebanyak 15 orang. Tugas kader posyandu adalah membantu kesehatan warga masyarakat, khususnya ibu-ibu untuk memeriksakan kesehatannya selama hamil, merawat bayi, dan lainnya. Dengan pemeriksaan kesehatan diharapkan angka kematian ibu dan bayi Kelurahan Antirogo dapat diminimalisir. Posyandu juga memberikan vitamin dan imunisasi kepada anak-anak agar mereka tumbuh sehat.

## **B Gotong Royong**

Kondisi sosial budaya masyarakat di Kelurahan Antirogo dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan kehidupan beragama. Ketiga aspek tersebut akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Tradisi gotong royong masyarakat Kelurahan Antirogo pada umumnya diwujudkan dalam kegiatan membantu perbaikan rumah tetangga, memperbaiki masjid, musholla, jalan, saluran air, membersihkan tempat pemakaman umum, dan lain-lainnya. Dalam tradisi gotong royong antusias warga dapat terlihat ketika memperbaiki rumah tetangga serta memperbaiki masjid. Biasanya, kegiatan gotong-royong ini diawali dengan pengumuman kepada masyarakat dari takmir masjid atau tokoh keagamaan lokal. Masyarakat akan merespons dengan baik pengumuman tersebut dan mereka akan melaksanakan kegiatan gotong royong membangun masjid atau mushola. Kegiatan gotong royong ini biasanya dilakukan pada saat

pembongkaran, pengecoran, dan pengangkutan barang-barang material yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dari waktu ke waktu kualitas kegiatan gotong royong mengalami pergeseran, jika dibandingkan dengan masa-masa yang lalu sebelum kapitalisasi pedesaan meluas. Pada masa lalu, menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti relatif mudah. Namun, saat ini kerja bakti hanya dilakukan oleh warga yang memiliki kesadaran sosial tinggi. Ada anggapan sebagian masyarakat, bahwa kerja bakti untuk membangun desa merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga pekerjaan tersebut harus disertai dana. Pandangan seperti ini terus menyebar kepada warga lainnya. Walaupun demikian, untuk menggerakkan masyarakat bergotong royong secara kolektif bergantung pada tokoh masyarakat.

Selain tradisi gotong royong dalam bentuk fisik, masyarakat Kelurahan Antirogo juga memiliki budaya saling membantu dalam tradisi daur hidup seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, sakit dan kematian. Masyarakat memiliki tradisi saling menyumbang antar warga masyarakat yang melahirkan bayi. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu. Sumbangan yang diberikan biasanya dalam bentuk barang, perlengkapan bayi, atau uang.

Saling menyumbang secara timbal-balik dalam khitanan juga masih cukup kuat. Acara khitanan dilakukan secara individual, kadang massal. Jika seorang warga yang memiliki hajat mengkhitanan anaknya itu juga pernah memberikan sumbangan pada acara yang sama, maka ketika ia berhajat juga akan menuai hal yang sama. Besar-kecilnya sumbangan ditentukan oleh kedekatan sosial dan kedermawanan orangnya. Ada juga yang memberikan sumbangan berupa beras, gula, minyak, kelapa, dan sarimi. Sumbangan dari saudara dan tetangga dekat ini dicatat dan suatu saat dikembalikan apabila saudara dan tetangga yang telah menyumbang tersebut mempunyai hajat sama.

Hajatan perkawinan bersifat terbuka karena merupakan suatu kesaksian sosial, sebab tidak mungkin kegiatan ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Warga masyarakat harus tahu. Karena itu, acara perkawinan harus dipersiapkan secara matang. Hal ini berbeda dengan khitanan, yang masih bisa dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Pada acara perkawinan ini, para tetangga dan kerabat

memberi sumbangan pada keluarga yang mempunyai hajat berupa uang dan barang. Barang itu bisa berupa gula, beras, kelapa, minyak, dan lainnya.

Fasilitas lain untuk menunjang acara perayaan perkawinan, seperti pembuatan *terop* juga dibuat secara bergotong royong yang melibatkan saudara dan tetangga dekat. Jika orang yang berhajat memiliki kemampuan ekonomi, biasanya dengan menyewa dari penyedia jasa *terop*.

Sakit dan kematian merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja. Tradisi tolong-menolong dalam hal ini masih cukup kuat terdapat Kelurahan Antirogo. Bu Wasil (37) di Kelurahan Antirogo, mengatakan bahwa sebagai pemilik toko pracangan, jika ada tetangganya yang sakit, ia pasti membantu, seperti memberi pinjaman uang sekitar Rp 25.000-Rp 50.000. Kalau biaya pengobatan di Puskesmas cukup besar, ia akan mencarikan keringanan pembiayaan dengan memintakan surat keterangan tidak mampu kepada pejabat kelurahan.

### **C. Pengajian/ sarowa'an**

Sarowa'an merupakan tradisi masyarakat yang masih kuat di wilayah utara Kabupaten Jember, utamanya di Kelurahan Antirogo. Kelompok pengajian muslimat melibatkan kaum perempuan. Namun dalam kelompok yang berbeda. Kadang kala setiap RT memiliki kelompok muslimat. Kegiatan pengajian ini diorganisir dalam sebuah organisasi yang berstruktur sederhana, biasanya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Pergantian kepengurusan dilakukan secara periodik sesuai dengan kesepakatan kelompok. Kegiatan pengajian dilaksanakan seminggu sekali.

Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti, masyarakat Kelurahan Antirogo merupakan masyarakat yang sangat religius, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas-fasilitas keagamaan yang ada di wilayah ini. Hal tersebut merupakan dasar untuk menggali informasi mengenai kearifan lokal yang berhubungan dengan bidang keagamaan di wilayah Kelurahan Antirogo. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang diberikan oleh PS (58 tahun)

*“acara agama warga edinak lumayan aktif, mon engkok dibik norok pengajian sebulan sekaleh bik pak bapak selaen, bik kegiatan pengajian setenga bulen sekaleh, acarana neng neng e mushola dinnak, acarana ceramah dari kyaeh deri ponduk pesantren sebedeh e jembuen”.*

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat Kelurahan Antirogo aktif dalam kegiatan agama. Kegiatan tersebut, biasanya dilakukan dengan mengundang Kyai dari pondok pesantren di Dusun Jambuan Kelurahan Antirogo untuk memimpin pengajian maupun memberikan ceramah yang jadwalkan dua minggu sekali di Mushola terdekat. Sejalan dengan hal tersebut PH (52 tahun) juga menyatakan bahwa:

*“kegiatan agama nang dinak cokop benyak, biasanah malem jumat pengajian e ponduk pesantren syahrul manan, terus seh laen anggwi bapak-bapak pengajian sebulan sekaleh bi setengah bulan”.*

Pernyataan tersebut sejalan dengan informan sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat mengikuti kegiatan agama. Informan PH (52 tahun) juga menambahkan, bahwa setiap malam jum'at terdapat pengajian yang diikuti oleh masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Syahrul Manan. Kedua informan tersebut memberikan rincian kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Antirogo, khususnya yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Kegiatan agama yang diikuti oleh perempuan juga cukup banyak. Sebagaimana informasi yang disampaikan BK (38 tahun), bahwa

*“mon ibu-ibu kegiatan agemanah biasana rutin setiap malem rebo, sholawatan. Edinak kuat agemenah, parak kabi warga norok kegiatan agama jieh”.* Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lain yakni BJ (56 tahun) *“ibu-ibu edinak aktif sara, edelem kegiatan agama. Mon malem minggu biasana tibakan, tahlilan bik sholawatan”.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya laki-laki saja yang aktif dalam kegiatan keagamaan, namun perempuan / ibu-ibu juga aktif. Hal tersebut juga dikuatkan oleh informan pendukung yakni PM (54 tahun)

*“Biasanya ada pengajian rutin yang kegiatannya ada di mushola ini, setengah bulan pertama untuk laki-laki, setengah bulan yang kedua untuk perempuan, dan ada juga pengajian khusus yakni RKM*

(rukun kematian) kalau tidak keliru setengah bulan sekali juga. Setiap minggu juga ada kegiatan pengajian muslimatan”.

Pernyataan dari informan pendukung menguatkan dari pernyataan beberapa informan kunci mengenai kegiatan keagamaan yang rutin. Beliau juga menambahkan adanya kegiatan yang disebut pengajian khusus RKM (Rukun Kematian). Kegiatan tersebut merupakan pengajian yang dilakukan untuk mengirim doa sanak saudara yang telah meninggal.

Kegiatan-kegiatan agama tersebut juga mendapat dukungan yang baik dari pihak Kelurahan. Seperti yang diungkapkan oleh PJ (44 tahun)

“Kegiatan agama di sini sangat kuat, secara rutin kelurahan selalu mengadakan pengajian akbar sebulan sekali. Biasanya kegiatannya berpindah-pindah di setiap lingkungan. Penceramahnya biasanya dua orang kyai, jadi pasti ramai, yang datang bahkan sampai luar Antirogo”.

Berbagai pernyataan di atas mengindikasikan bahwa, terdapat potensi sosial budaya dalam bentuk wadah keagamaan maupun tatanan serta nilai-nilai agama yang dapat menjadi sumber belajar dalam kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional untuk kemudian digerakkan sebagai sarana dalam menjalankan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di Kabupaten Jember. Sumber belajar tersebut dapat berwujud materi pembelajaran, aturan pembelajaran, media pembelajaran maupun sebagai alat pembelajaran.

### **5.3. Pemanfaatan Potensi Lokal**

Program keaksaraan merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan non formal yang dikembangkan pemerintah dalam rangka memerangi ketidakberdayaan masyarakat agar melek aksara. Mengingat, faktor pemicu ketidakberdayaan antara lain adalah ketidakkemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia mengalami kebodohan dan kemiskinan. Dengan demikian, pelayanan pendidikan yang diwujudkan melalui program keaksaraan berguna memberikan pendidikan dasar bagi orang dewasa (*adult basic education*) yang pada masa mudanya belum memperoleh pendidikan sebagai bekal hidup.



Fokus utama program keaksaraan adalah pemberdayaan masyarakat penyandang buta aksara. Indikator keberhasilan program tersebut antara lain meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melek aksara, melek angka, melek Bahasa Indonesia, sehingga kemampuan tersebut dapat difungsikan untuk merespon situasi yang ada disekitarnya. Terutama berguna untuk mengakses sumber-sumber kehidupan dengan memanfaatkan potensi yang ada disekitarnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh penyelenggara program keaksaraan di Kabupaten Jember, bahwa program keaksaraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung kepada perempuan. Mengingat, penyandang buta aksara terbesar adalah perempuan. Namun demikian, tidak semua sasaran program keaksaraan adalah perempuan. Laki-laki pun juga terlibat untuk mengikuti program tersebut. Meskipun secara kuantitas jumlah laki-laki yang terlibat dalam program keaksaraan tidak sebanyak perempuan.

Di Kelurahan Antirogo, program keaksaraan juga memiliki tujuan sama. Meskipun proses pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Namun demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun melalui FGD diketahui, bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami program keaksaraan memiliki nilai manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hal tersebut diungkapkan oleh Najmi (40 tahun), bahwa masyarakat belum sadar terhadap pentingnya melek aksara, sebab selama ini masih belum terdapat masyarakat yang datang secara mandiri mendaftar sebagai warga belajar. Sebagian besar masyarakat mengikuti kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional karena adanya pola pemikiran pragmatis. Dimana pembagian sembako yang diberikan oleh penyelenggara menjadi motivasi utama. Kedatangan warga bukan karena tuntutan peningkatan kualitas hidup.

Untuk itu, perlu adanya reformulasi kebijakan dalam penyelenggaraan program keaksaraan fungsional yang lebih memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat memecahkan kebutuhan hidupnya. Antara lain dapat dilakukan dengan menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Maupun menyusun media pembelajaran yang sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang terdapat di sekitar.

## **A. Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional**

Menurut pedoman pelaksanaan, penyelenggara program keaksaraan dapat dilakukan oleh: 1) unsur individu yang memiliki perhatian terhadap pemberantasan buta aksara, 2) unsur pemerintah (penilik dikmas, SKB dan Pemerintah Desa), dan 3) unsur masyarakat (PKBM, DPD, Pondok Pesantren, Karang Taruna). Selain itu penyelenggara diharapkan memiliki karakteristik: 1) memiliki data dasar buta aksara, 2) memiliki daftar daerah yang masyarakatnya sebagian besar terdapat kantong buta aksara, 3) memiliki tutor yang memenuhi persyaratan, 4) mampu melakukan program pembelajaran dan 5) mampu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh kelompok belajar.

Berdasarkan analisis data primer diketahui bahwa program keaksaraan di Kelurahan Antirogo diselenggarakan oleh organisasi masyarakat yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Mengingat kondisi sosial budaya masyarakat di Indonesia tidak sama, maka penyelenggara program keaksaraan dilakukan dengan proses yang berbeda. Menurut informasi dari Sudiono selaku kepala bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) Kabupaten Jember, bahwa program keaksaraan diselenggarakan oleh organisasi masyarakat yang telah mengajukan proposal sebagai penyelenggara dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten. Dalam hal ini, Dinas Kabupaten memiliki peran sebagai penyandang dana serta sebagai monitoring dan evaluasi program.

Program keaksaraan di Kabupen Jember secara umum diselenggarakan oleh organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan maupun sosial kemasyarakatan. Organisasi masyarakat tersebut memiliki berfungsi yang cukup besar untuk menciptakan masyarakat melek aksara. Keberadaan organisasi tersebut telah diakui oleh masyarakat lokal. Mengingat organisasi masyarakat telah memiliki anggota tetap dan bersifat permanen, sehingga memudahkan proses pendataan warga penyandang buta aksara. Selain itu, organisasi masyarakat dibentuk dan diinisiasi oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial masyarakat secara umum. Dimana, keberadaan organisasi tersebut kekal keberadaannya. Oleh karena itu, keberadaan organisasi masyarakat tersebut dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial.



Mengingat, organisasi masyarakat Kelurahan Antirogo belum berjalan secara permanen dan berkelanjutan, maka program keaksaraan fungsional yang diselenggarakan belum maksimal. Dalam hal ini, program keaksaraan dilakukan oleh unsur masyarakat yang memiliki basis anggota dan memiliki tutor dengan membentuk kelompok belajar. Hal tersebut juga diungkapkan Hasan, bahwa:

”di Kabupaten Jember, kami memanfaatkan organisasi masyarakat. Karena sesuai dengan pedoman yang ada. Dimana di Jember banyak organisasi masyarakat telah berjalan. Selain itu, orientasi masyarakat Jember sebagian besar masih memegang nilai agama dan bersifat religius. Waktu mereka sepenuhnya untuk bekerja. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan program keaksaraan dengan melibatkan pemerintah desa. Kami meminta aparat desa melalui RT melakukan pendataan warga yang masih belum melek aksara. Hasil pendataan kami jadikan dasar membuat kelompok warga belajar pada program keaksaraan fungsional”.

Program keaksaraan fungsional di Kelurahan Antirogo, diselenggarakan oleh oleh unsur pemerintah maupun unsur masyarakat. Dari unsur pemerintah, program keaksaraan diselenggarakan atas kerjasama berbagai pihak dan elemen masyarakat di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten.

Meskipun penyelenggara program keaksaraan dilakukan oleh berbagai unsur, namun proses pelaksanaan program dilakukan secara berkelompok. Kelompok belajar terdiri dari 10-20 orang warga belajar. Kelompok belajar dibentuk atas dasar kedekatan tempat tinggal warga belajar. Sebagaimana ungkapkan oleh 100% responden, bahwa kelompok dibentuk atas dasar kedekatan tempat tinggal. Pada umumnya kelompok belajar dibentuk belum atas dasar kesamaan jenis pekerjaan maupun kesamaan jenis kelamin yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar membentuk kelompok usaha bersama (KUB) maupun kelompok usaha mandiri (KUM).

Menurut analisa data FGD, bahwa kelompok belajar yang dibentuk atas dasar kedekatan tempat tinggal memudahkan penyelenggara untuk melakukan koordinasi serta mengembangkan potensi daerah yang dapat dijadikan materi pembelajaran guna meningkatkan keterampilan warga belajar. Artinya program keterampilan sebagai bentuk pengembangan pada program keaksaraan bukan merupakan program lanjutan dari usaha masyarakat yang telah mapan. Akan

tetapi, keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar dan potensi sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal warga belajar.

Selain itu, penyelenggara melakukan perekrutan tutor dari unsur pendidik. Artinya tutor adalah orang yang memiliki kemampuan akademik untuk mengembangkan pendidikan. Akan tetapi di Kabupaten Jember, tutor direkrut atas dasar kedekatan tempat tinggal dengan warga belajar yang memiliki ijazah SLTA/Sederajat. Selain itu, mayoritas tutor program keaksaraan berasal dari organisasi penyelenggara tersebut.

## **B. Proses Pembelajaran Program Keaksaraan Fungsional**

Mengingat warga belajar program keaksaraan adalah orang dewasa maka, proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Artinya proses pembelajaran menggunakan prinsip bahwa orang dewasa memiliki pengalaman yang dapat menjadi sumber belajar. Selain itu proses pembelajaran juga disesuaikan dengan psikologis orang dewasa. Akan tetapi Begitu pula sarana pembelajaran juga harus disesuaikan dengan fisik orang dewasa. Dalam hal ini proses pembelajaran keaksaraan fungsional yang dilakukan dengan memperhatikan: metode pembelajaran, media pembelajaran, tutor, materi pembelajaran dan evaluasi.

### **1. Metode Pembelajaran Program Keaksaraan Fungsional**

Metode merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan tutor untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pada program keaksaraan, metode pembelajaran disesuaikan dengan materi. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi diskusi, membaca, menulis, berhitung, dan aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat warga belajar serta potensi lingkungan yang ada.

Metode diskusi, pada umumnya dilakukan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan warga belajar. Dalam hal ini, tutor lebih banyak menawarkan tema yang menjadi materi pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan responden melalui FGD, bahwa diawal pembelajaran tutor lebih banyak menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran guna mengidentifikasi kebutuhan warga belajar.

Selain itu metode menulis dan membaca dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga belajar agar melek aksara. Dalam hal ini warga belajar diminta untuk belajar menulis dan membaca sesuai dengan tema dan materi pembelajaran yang telah disepakati bersama. Sebagaimana diungkapkan Ofri, selaku tutor program keaksaraan bahwa,

”kegiatan program keaksaraan tidak dapat dilakukan hanya dengan berdiskusi, tutor tetap meminta dan mendorong warga belajar untuk belajar membaca dan menulis sesuai tema yang telah ditentukan. Setelah itu, ada proses tersebut dilanjutkan dengan aksi, yaitu melakukan praktek. Praktek berdasar pada materi yang telah dipelajari.”

Selain itu, di Kabupaten Jember metode menulis diberikan dengan mengenalkan huruf dari susunan masing-masing nama warga belajar. Sebagaimana diungkapkan oleh Ana. Berikut pernyataan Ana:

” pembelajaran kami berikan dengan metode menulis. Warga belajar kita minta untuk menuliskan namanya sendiri. Dengan demikian mereka akan mengenal huruf. Tetapi kita masih mengalkan huruf balok. Karena, kalau mengenalkan huruf latin, warga belajar masih kesulitan, sebab warga belajar sering menjumpai tulisan dalam bentuk huruf balok, jarang menjumpai huruf kecil”.

Berdasarkan ungkapan di atas, tutor menerapkan metode pendekatan pengalaman berbahasa (PBB). Dimana warga belajar sering menyebutkan maupun mendengarkan namanya sendiri. Metode ini memiliki tujuan untuk menggali pengalaman berbahasa warga belajar yang dapat dijadikan sumber belajar. Warga belajar menginginkan kata-kata baru yang belum dikenal sebagai tema pembelajaran. Dalam hal ini warga belajar menginginkan pengetahuan baru yang dapat menjadi referensi dalam hidupnya. Warga belajar memiliki semangat untuk mengembangkan diri. Sebagaimana diungkapkan oleh Lusy, tutor program keaksaraan, bahwa:

” Selama ini saya berupaya untuk mengenalkan huruf yang sudah terbiasa warga belajar ungkapkan. Harapannya, kata-kata yang selama ini sudah dikenal hanya melalui ungkapkan dapat mereka kenal melalui gabungan huruf maupun kata. Akan tetapi rata-rata warga belajar saya tidak mau, mereka menginginkan saya mengenalkan kata atau istilah yang mereka belum kenal. Alasannya untuk menambah pengetahuan.”

Selain itu proses pembelajaran pada program keaksaraan juga dilakukan dengan menggunakan metode kata kunci (*key words*), yang disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Metoda ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang dihadapi warga belajar guna menstimulus kreatifitas dan pemikiran kritis, sehingga melalui program keaksaraan warga belajar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bayu, bahwa:

”Kita mencoba memberikan pembelajaran yang bermakna bagi warga belajar. Melalui observasi kita dapat mengidentifikasi permasalahan warga belajar, sehingga masalah tersebut dapat kami jadikan tema pembelajaran melalui metode kata kunci. Suatu misal, karena banyak masyarakat yang tidak bisa baca tulis, maka seringkali anak membohongi orangtua dengan mengatakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Selain itu, ketika transaksi warga harus tandatangan. Akan tetapi, warga tidak bisa untuk tandatangan, sehingga menggunakan cap jempol.”

Dari pernyataan di atas menggambarkan bahwa pengalaman warga belajar memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai sumber belajar. Dimana proses belajar memiliki implikasi nyata terhadap kehidupan warga belajar. Dengan demikian, warga belajar dapat meningkatkan kapasitas diri sehingga menjadi lebih mandiri serta mampu merespon situasi disekitarnya.

## **2. Media Pembelajaran Program Keaksaraan Fungsional**

Berdasarkan hasil FGD (*fokus group discusion*), diketahui bahwa pelaksanaan proses pembelajaran pada program keaksaraan fungsional perlu dilengkapi oleh media. Dalam hal ini media berfungsi untuk mempermudah penyampaian materi agar lebih cepat diserap oleh warga belajar. Akan tetapi secara umum media pembelajaran disediakan oleh tutor.

Di Kabupaten Jember, program keaksaraan dilaksanakan tanpa menggunakan media. Sebagaimana diungkapkan oleh Zubairy, bahwa materi pembelajaran disampaikan tanpa menggunakan media yang dapat lebih merangsang minat warga belajar. Menurutnya media yang disediakan hanya sebatas papan tulis yang kadang memanfaatkan bekas kalender. Akan tetapi, pada proses penyelenggaraan program keaksaraan di Kabupaten Jember tutor telah mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media yang telah dibuat tutor sesuai materi.

Namun, di Kabupaten Jember semua proses penyelenggaraan program keaksaraan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Pemerintah juga telah menyiapkan media pembelajaran dalam bentuk papan tulis beserta perangnya, serta media lain dalam bentuk kartu pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Lusy, bahwa penyelenggara telah mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk kartu yang mengenalkan huruf dan disertai gambar. Dalam hal ini pemerintah melakukan pelatihan kepada tutor, agar mampu mengembangkan media serta metode pembelajaran yang sesuai psikologis orang dewasa. Media pembelajaran juga, banyak yang telah dikembangkan oleh Tutor.

### 3. Materi Pembelajaran

Berdasarkan analisis data kuantitatif diketahui bahwa sebagian besar penyelenggara telah menyampaikan materi secara tematik kepada warga belajar. Selain itu, materi disampaikan dengan bantuan modul yang diterima dari Dinas Pendidikan untuk kemudian disebarluaskan. Sejalan dengan ungkapan Linda, bahwa pembelajaran yang diberikan pada program keaksaraan fungsional adalah materi tematik. Artinya, pembelajaran bingarcalistung tidak dilakukan secara terpisah. Melainkan dilakukan secara terpadu menjadi kesatuan yang utuh.

Namun di Kabupaten Jember, materi pembelajaran keaksaraan fungsional diberikan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan tanpa dilakukan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan warga belajar. Berbeda halnya dengan proses pelaksanaan keaksaraan fungsional di Kabupaten lainnya yang telah melakukan pembelajaran keaksaraan fungsional sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar. Dalam hal ini warga belajar dilibatkan untuk menentukan materi yang bermanfaat bagi kehidupan.

Selain itu, di Kabupaten Jember materi pembelajaran belum diberikan sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Dimana materi pembelajaran hanya menekankan pada pengenalan angka dan huruf saja. Materi belum disajikan dengan memanfaatkan potensi lokal. Mengingat setiap wilayah dipastikan memiliki potensi di tingkat lokal yang berbeda dan mampu memberikan sumber



ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, materi pembelajaran diberikan dengan metode aksi atau praktek. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang diberikan juga dipraktekkan. Tujuannya, selain warga belajar memiliki kemampuan membaca dan menulis, warga belajar juga memiliki keterampilan hidup (*life skill*). Dengan demikian warga belajar lebih memiliki tingkat keberdayaan dan lebih mandiri.

#### **4. Tutor Program Keaksaraan Fungsional**

Berdasarkan hasil observasi dan hasil FGD, ditemukan bahwa di Kabupaten Jember, tutor keaksaraan fungsional sebagian besar belum memiliki kemampuan dibidang pendidikan. Dimana tutor terdiri dari masyarakat lokal yang memiliki kualifikasi lulusan SLTA tanpa diimbangi kemampuan untuk mengembangkan materi dan metode pembelajaran, sehingga analisa membaca dan merespon kebutuhan psikologis warga belajar masih kurang dibandingkan tutor yang ada di lainnya.

Menurut data yang dihimpun, di Kabupaten Jember penyelenggara merekrut tutor yang memiliki latar belakang tenaga pendidik di sekolah formal. Penyelenggara mempunyai anggapan bahwa, latar belakang pendidikan dan pengalaman tutor dapat menjadi pemicu kesuksesan program keaksaraan, sehingga tolak ukur keberhasilan program keaksaraan tidak dilihat secara kuantitatif. Akan tetapi lebih dilihat secara kualitatif, bahwa peningkatan kemampuan masyarakat melek aksara dapat dilihat dari mampu masyarakat memfungsikan aksara yang telah dipelajari.

Ketidakmampuan tutor untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar berdampak pada minat warga belajar selama proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan minat dan motivasi warga belajar untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga tutor dan penyelenggara harus memberi motivasi dalam bentuk materi, antara lain: pemberian sembako dan makanan ringan pada saat proses pembelajaran.



## **5. Evaluasi Program Keaksaraan Fungsional**

Berdasarkan analisis hasil FGD, diketahui bahwa evaluasi telah dilakukan oleh penyelenggara melalui peran tutor. Akan tetapi pada kasus program keaksaraan fungsional yang diselenggarakan di Kelurahan Antirogo, diketahui bahwa Dinas Pendidikan belum melakukan evaluasi pembelajaran. Warga belajarpun belum mengikuti ujian dan belum memperoleh surat keterangan melek aksara (SUKMA). Akan tetapi pada proses pembelajaran tutor tetap melakukan evaluasi dengan cara memberikan test kepada warga belajar, selain itu juga mengecek tugas yang dikerjakan oleh warga belajar.

Namun demikian, Di Kabupaten Jember Dinas Pendidikan telah mengeluarkan SUKMA I (Dasar) sebagai bentuk evaluasi pembelajaran program keaksaraan. SUKMA I merupakan salah satu syarat bagi warga belajar untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada program keaksaraan lanjutan. Akan tetapi, antara program keaksaraan dasar dan lanjutan terdapat jarak waktu yang cukup lama. Sebagaimana diungkapkan oleh Linda, bahwa lamanya waktu untuk melanjutkan program keaksaraan dasar menuju program keaksaraan lanjut cukup lama, hal ini berdampak pada peningkatan kemampuan warga belajar. Dimana warga belajar yang mayoritas adalah orang tua mengalami penurunan kemampuan untuk mengingat aksara yang telah dikenal. Hal ini juga dialami oleh penyelenggara program keaksaraan di Kabupaten Jember bahwa, program keaksaraan lanjutan masih tergantung dari dana pemerintah.

### **5.3 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keaksaraan Fungsional**

#### **a. Akses Masyarakat**

Sebagian besar warga belajar yang mengikuti proses pembelajaran keaksaraan fungsional adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan kondisi maupun tujuan program. Dimana mayoritas perempuan merupakan korban kemiskinan, akibat kurangnya akses terhadap layanan pendidikan formal. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat menempatkan perempuan ter subordinat untuk mendapat layanan pendidikan. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penyandang buta aksara maupun jumlah warga belajar program keaksaraan fungsional.

Namun demikian, pada program keaksaraan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses layanan pendidikan cukup besar. Di Kelurahan Antirogo masih ditemukan perempuan yang memiliki minat tinggi untuk mengikuti proses pembelajaran pada program keaksaraan, akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari suaminya. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Andi, bahwa:

”pernah saya melakukan pendataan warga belajar untuk program keaksaraan yang saya tujukan kepada perempuan. Ketika saya datang untuk menawarkan program tersebut ibu itu sangat senang dan mau ikut. Akhirnya saya beri dia perangkat pembelajaran, seperti: buku panduan, alat tulis. Tetapi setelah itu, ibu tersebut datang ke saya dan membatalkan untuk mengikuti program keaksaraan. Alasannya, tidak diijinkan oleh suaminya.”

Dari pernyataan tersebut dapat tergambar, bahwa sosial budaya masyarakat kemampuan perempuan untuk lebih berkuasa terhadap dirinya pun masih rendah. Perempuan belum mampu membuat keputusan yang terkait dengan dirinya. Meskipun demikian, masih banyak laki-laki yang memberi kesempatan kepada perempuan (istri) untuk mengikuti program keaksaraan. Untuk itu peran lembaga lokal sangat tinggi dalam hal ini. Dimana sebagian besar perempuan mengikuti kegiatan organisasi. Hal ini peluang besar untuk melakukan peningkatan keberdayaan perempuan melalui organisasi tersebut. Mengingat organisasi yang terbentuk di tingkat lokal telah mendapat pengakuan oleh masyarakat dan berpotensi sebagai dasar pembentukan kelompok.

Berdasarkan hasil observasi, kemampuan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi warga belajar pada program keaksaraan masih berhubungan erat dengan keterlibatan perempuan dalam organisasi masyarakat. Dimana perempuan yang telah menjadi anggota pada organisasi masyarakat dapat mudah memperoleh kesempatan untuk mendaftar sebagai warga belajar. Akan tetapi, pada program keaksaraan yang diselenggarakan dari unsur pemerintah, kemampuan perempuan lebih rendah. Dimana perempuan yang mengikuti program keaksaraan masih harus mendapat persetujuan dari suami. Sebagaimana hasil analisis data kuantitatif yang menyebutkan bahwa sebanyak 80% perempuan telah mampu mendaftar menjadi warga belajar melalui organisasi masyarakat yang telah diikuti.

## **b. Partisipasi Masyarakat**

Pada program keaksaraan, tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini nampak pada saat proses kegiatan keaksaraan. Sebagaimana analisis data FGD yang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki respon lebih rendah dibanding perempuan. Pada proses penyelenggaraan keaksaraan fungsional di Kabupaten Jember, tingkat partisipasi laki-laki relatif lebih rendah. Meskipun pada kenyataannya laki-laki tergolong masyarakat buta aksara. Pekerjaan merupakan salah satu pemicu laki-laki yang menjadi alasan tidak mengikuti program tersebut. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Antirogo. Dimana Laki-laki cenderung malu mengakui, bahwa dirinya belum melek aksara. Selain itu, kehadiran laki-laki masih diwarnai oleh kebutuhan politis. Dimana kedatangan warga bukan atas dasar keinginan dalam peningkatan kapasitas didi. Melainkan karena kebutuhan yang bersifat praktis.

Berdasarkan analisa data kuantitatif disebutkan, bahwa keterlibatan perempuan untuk mengikuti proses pembelajaran pada program keaksaraan sebesar 97%. Namun, kemampuan perempuan untuk mengungkapkan ide masih sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih mampu untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dibandingkan laki-laki. Namun, kemampuan tersebut masih perlu mendapat rangsangan. Dimana perempuan cenderung untuk mengikuti segala aturan tanpa ada perlawanan. Perempuan cenderung ingin ditata. Hal ini sebagaimana kondisi sosial budaya masyarakat yang selalu menempatkan perempuan di wilayah domestik. Perempuan enggan aktif mengeluarkan ide. Mereka cenderung lebih pasif dan menggantungkan keputusan pada orang lain.

Menurut Bayu, rata-rata laki-laki merasa malu dan gengsi untuk mengikuti program keaksaraan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan program keaksaraan keterlibatan laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan perempuan. Meskipun jumlah perempuan yang terlibat dalam program keaksaraan lebih banyak, akan tetapi materi keterampilan yang diberikan masih bias gender. Artinya materi keterampilan yang diberikan lebih dikhususkan untuk perempuan. Misalnya: materi membuat kue, materi memasak. Akibatnya laki-laki tidak mengikuti materi tersebut.

## **c. Kontrol Perempuan**

Meskipun kemampuan perempuan untuk terlibat dalam program keaksaraan cukup besar, akan tetapi kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program cukup rendah. Dimana perempuan belum dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi program.

Namun, di Kabupaten Kapuas, keterlibatan perempuan untuk menentukan dan menjalankan program pembelajaran cukup tinggi. Hal ini, berdampak pada kemampuan perempuan untuk melakukan kontrol terhadap proses penyelenggaraan program keaksaraan. Kondisi ini dibuktikan dengan kemampuan perempuan untuk melakukan protes apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana yang telah disusun bersama.

## **d. Manfaat Program Keaksaraan bagi Masyarakat**

Dari data yang telah dihimpun, diperoleh penjelasan bahwa program keaksaraan memiliki manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagaimana analisis data kuantitatif, bahwa sebanyak 100% perempuan mengatakan program keaksaraan memberikan manfaat cukup besar untuk proses kehidupan warga belajar. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Irma kepala bidang keaksaraan di Kabupaten Jember, yang mengatakan bahwa banyak manfaat yang telah diperoleh warga belajar setelah mengikuti program keaksaraan fungsional. Berikut pernyataan Linda:

”program keaksaraan memiliki manfaat cukup besar untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Misalkan, awalnya masyarakat tidak bisa baca tulis setelah mengikuti program keaksaraan dapat membaca dan menulis, dapat tandatangan, tidak lagi menggunakan cap jempol untuk melakukan transaksi. Selain itu dalam program keaksaraan warga belajar juga dapat mengembangkan keterampilan. Meskipun sampai sekarang kita belum membina kelompok.”

Akan tetapi di Kabupaten Jember, kelompok belajar yang diselenggarakan oleh Laboratorium PLS telah mampu membuat kerajinan tangan berbahan dasar kulit jagung. Sebagaimana diungkapkan oleh bayu, selaku tutor program keaksaraan. Berikut pernyataannya:

” kelompok belajar ditempat saya telah melakukan praktek dan mampu memanfaatkan kulit jagung yang selama ini dipakai pakan sapi. kerajinan tersebut diproduksi oleh warga belajar dalam bentuk kelompok usaha bersama..”

Dari ungkapan di atas dapat digambarkan bahwa masyarakat yang melek aksara dapat meningkatkan kapasitas diri. Selain itu warga belajar lebih dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan *life skill*. Meskipun demikian tidak semua penyelenggara program keaksaraan telah membentuk kelompok usaha bersama maupun kelompok usaha mandiri.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Irma, bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berupaya membentuk kelompok usaha yang sesuai dengan potensi sumber daya alam. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan memiliki orientasi dalam memberikan keterampilan kepada warga belajar program keaksaraan tingkat lanjut untuk mengembangkan potensi yang ada.

Selain itu, program keaksaraan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengikuti perkembangan teknologi, sebagaimana pernyataan dari Misnah, bahwa manfaat yang dapat dirasakan warga belajar adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan *hand phone*.

## **5.5 Kompetensi Masyarakat Dalam Program Keaksaraan Fungsional**

Saat ini, kemiskinan bukan menjadi isu kemasyarakatan. Akan tetapi, kemiskinan telah menjadi masalah yang harus diselesaikan secara mendasar. Pemberian bantuan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan bukan merupakan jawaban untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Akan tetapi upaya penyadaran kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan melalui pendekatan pemberdayaan adalah strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Terutama, perempuan yang secara kebetulan menjadi korban pertama dan utama kemiskinan. Dalam hal ini, program keaksaraan merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan. Mengingat, keberdayaan masyarakat merupakan modal utama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.



Paling tidak terdapat dua alasan bahwa program keaksaraan lebih banyak ditujukan kepada perempuan, antara lain: *pertama*, bahwa perbedaan jenis kelamin mengakibatkan ketidakadilan gender. Dimana perempuan memiliki keterbatasan untuk melakukan akses terhadap dunia pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari data statistik yang selalu menunjukkan jumlah laki-laki yang mendapatkan layanan pendidikan formal lebih banyak dibandingkan perempuan. Akibatnya perempuan lebih banyak yang belum melek aksara dibandingkan laki-laki. Kemampuan perempuan untuk mengakses sumber-sumber kehidupanpun relatif lebih rendah. Bahkan, seringkali perempuan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar, akibat konstruksi sosial budaya masyarakat yang menempatkan perempuan untuk melakukan pekerjaan domestik.

*Kedua*, bahwa kurikulum yang dikembangkan pada pendidikan formal masih bias gender. Akibatnya, perempuan semakin dirugikan oleh layanan pendidikan. Bahkan, pendidikan formal di Indonesia masih belum menjawab kebutuhan praktis dan strategis gender secara spesifik. Seringkali materi pembelajaran yang diberikan semakin menegaskan ketidakadilan gender. Selain itu, kemiskinan merupakan faktor pemicu diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan.

Berdasarkan data yang telah disajikan menggambarkan bahwa, program keaksaraan fungsional telah mampu mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Hal ini terlihat dari manfaat yang telah diperoleh warga belajar. Dimana perempuan telah mampu menentukan keputusan yang terkait dengan kehidupannya. Tingkat keberdayaan perempuan yang dilihat dari kemampuan untuk setara dengan laki-laki dalam mengakses layanan pendidikan.

Konsep yang dikembangkan dalam program keaksaraan pada dasarnya berprinsip pada: kemerdekaan, kesetaraan, humanisme, plurarisme dan transformatif. Oleh karena itu, melalui program keaksaraan keberdayaan perempuan akan lebih meningkat. Selain itu, keberadaan perempuan untuk mengakses sumber-sumber kehidupan dan kemampuan untuk melakukan respon akan situasi yang ada disekitarnya setara dengan laki-laki. Mengingat rendahnya kemampuan perempuan diakibatkan oleh kurangnya layanan pendidikan. Dimana



perempuan buta aksara memiliki nilai tawar yang rendah. Bahkan laki-laki belum menempatkan perempuan sebagai mitra kerja. Melainkan sebagai *konco wingking* (teman belakang) yang tidak dapat membuat dan menentukan keputusan.

Pelaksanaan program keaksaraan yang lebih memperhatikan aspek gender akan lebih memberikan warna bagi perkembangan pembangunan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas. Mengingat, masyarakat miskin dan bodoh disebabkan oleh masyarakat yang belum melek aksara. Dimana melek aksara merupakan faktor utama untuk mencerdaskan bangsa dari kebodohan dan keterbelakangan.

Kelompok belajar yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa program keaksaraan telah peka gender. Meskipun, perempuan lebih mendominasi kegiatan program tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan laki-laki yang mengalami buta aksara merasa malu untuk menjadi komunitas pembelajar pada program keaksaraan.

Namun demikian masih ditemukan tutor program keaksaraan yang belum memaksimalkan kemampuan mengajar. Dimana materi pembelajaran belum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Materi yang diberikan masih mengikuti modul yang telah diperoleh dari Dinas Pendidikan. Selain itu masih terdapat tutor yang memberikan pembelajaran masih belum memiliki kemampuan untuk membuat media maupun metode yang tepat.

Dimana metode dan media pembelajaran merupakan salah satu pemicu untuk meningkatkan motivasi warga belajar. Peran tutor tidak hanya sebatas memberikan materi tetapi tutor memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan diri sehingga memiliki ketrampilan dan pemikiran kritis, reflektif, imajinatif, dan kolaboratif. Tutor harus memiliki kemampuan berinteraksi dan merumuskan kebutuhan warga belajar. Dengan demikian program keaksaraan akan bermakna.

## **5.6 Peran Organisasi Masyarakat dalam Program Keaksaraan Fungsional**

Dalam hal ini organisasi masyarakat memiliki peran cukup besar dalam melakukan kegiatan program keaksaraan guna memberdayakan perempuan. Mengingat, kultur sosial budaya masyarakat masih menempatkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari data yang dihimpun diketahui, bahwa organisasi masyarakat memiliki peran untuk menciptakan masyarakat melek aksara. Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa hanya di Kabupaten Jember program keaksaraan yang diselenggarakan hanya oleh organisasi masyarakat.

Mengingat organisasi masyarakat merupakan organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat, maka keberadaannya lebih bersifat pemanen. Dengan demikian, dalam program keaksaraan organisasi masyarakat memiliki peran untuk melakukan pendataan dan pemetaan kepada anggota yang belum melek aksara. Dimana organisasi masyarakat memiliki anggota tetap. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam organisasi masyarakat merupakan pintu masuk untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan mewujudkan masyarakat gemar belajar

## **BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA**

Kegiatan penelitian ini telah menemukan berbagai manfaat potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan untuk program keaksaraan fungsional. Pada tahap rencana tindak lanjut, penelitian ini akan lebih menekankan implemenrasi pemanfaatan kelembagaan lokal yang dihimpun secara mendalam melalui kuesioner dan wawancara. Hasil analis data penelitian akan disajikan dalam laporan akhir penelitian selanjutnya . Sistematika kegiatan yang akan dilakukan untuk menyusun laporan akhir tersebut antara lain:

1. Melengkapi berbagai data yang telah dikumpulkan di lapangan antara lain data yang dihimpun melalui kuesioner dan wawancara jika memungkinkan dibutuhkan penambahan dan kesalahan data.
2. Melengkapi data tentang kelembagaan lokal yang menjadi fokus penelitian, hal ini dimungkinkan masih terdapatnya data yang masih belum ter gali dan berpotensi sebagai penghambat ataupun pendorong untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat .
3. Menggali data tentang kondisi social budaya masyarakat perdesaan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Jember dan memiliki potensi untuk mengembangkan program keaksaraan fungsional.
4. Menggali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggulangi kemiskinan. Serta mengkaji pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Jember.
5. Memperkuat literatur yang relevan dengan topik penelitian.
6. Menyiapkan poster dan penerbitan naskah hasil penelitian pada jurnal nasional

## BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Program keaksaraan merupakan salah satu layanan pendidikan yang diberikan pendidikan luar sekolah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kebodohan akibat rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Mengingat sasaran program keaksaraan adalah orang dewasa, maka pendekatan yang digunakan dalam program tersebut bukan lagi pendekatan *pedagogie*, melainkan pendekatan *andragogie*. Dimana proses pembelajaran diberikan dengan prinsip bahwa orang dewasa memiliki pengalaman yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Tutor bukan sumber belajar, serta bukan pendidik. Akan tetapi tutor memiliki peran sebagai motivator untuk mengembangkan potensi warga belajar.

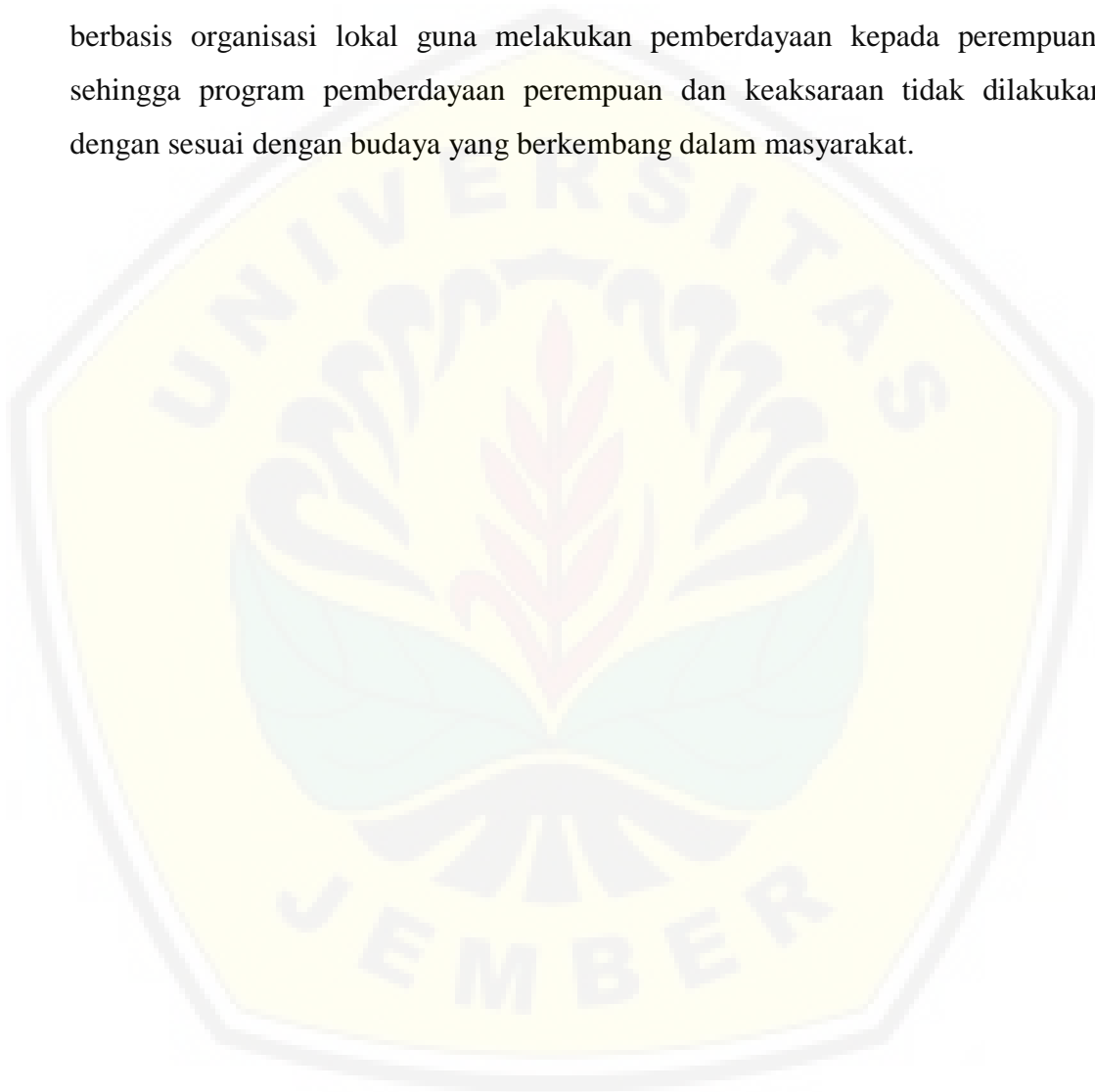
Pada program keaksaraan yang dilakukan dapat diketahui, bahwa program tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan praktis dan strategis gender. Dimana dalam kegiatan program tersebut, kapasitas perempuan lebih meningkat. Selain itu, perempuan juga lebih memiliki keterampilan untuk dapat mengakses sumber-sumber kehidupan. Akibatnya, perempuan memiliki nilai tawar yang setara dengan laki-laki.

Nilai tawar yang dimiliki perempuan dapat menjadi salah satu pondasi utama perempuan untuk dapat lebih membuat keputusan strategis terkait pilihan-pilihan yang terkait dengan kehidupannya. Dengan demikian, perempuan akan terlepas dari masalah kemiskinan, kebodohan, maupun ketidakberdayaan.

Selain itu, masyarakat memiliki kebiasaan berkelompok yang diwujudkan dalam bentuk berorganisasi, sehingga keberadaan organisasi tersebut berpotensi sebagai wadah untuk menyelenggarakan program keaksaraan. Mengingat keberadaan organisasi masyarakat merupakan organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. Keberadaannya diakui oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu model penyelenggaraan program keaksaraan yang berbasis organisasi lokal. Dimana organisasi tersebut dapat memainkan peran untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam maupun sumber daya manusia sebagai modal penggerak pembangunan.

## A. Saran

Dalam penelitian ini, tim pengembang masih melakukan penelitian tahap pertama yaitu, pemetaan organisasi yang dapat dikembangkan dalam program keaksaraan. Penelitian pengembangan ini, masih memerlukan kajian lebih lanjut yang dapat menghasilkan panduan penyelenggaraan program keaksaraan yang berbasis organisasi lokal guna melakukan pemberdayaan kepada perempuan, sehingga program pemberdayaan perempuan dan keaksaraan tidak dilakukan dengan sesuai dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Freire, P. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Yogyakarta. LP3ES
- Ife dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Mahardika, T. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Yogyakarta. Pondok Edukasi.
- Marzuki, S. 2009. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Nonformal*. Malang. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Narayan, D. 2005. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*. Washington, DC. The Word Bank.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Singarambun dan Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Smith, W. 2008. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta. PustakaPelajar
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strtegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A . 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gaya Media.



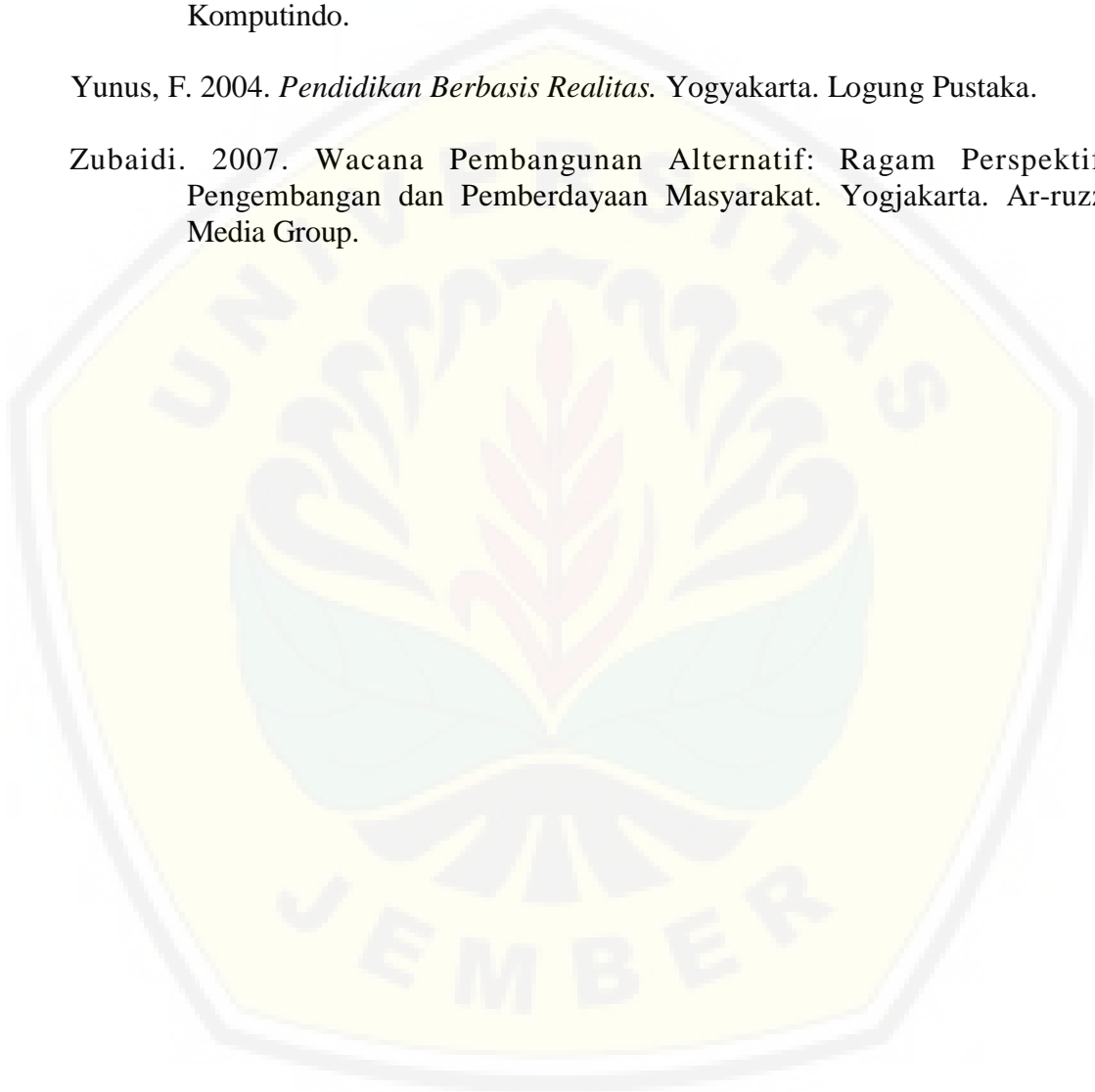
Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta. Global Pustaka Utama.

Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. PustakaPelajar.

Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Elek Media Komputindo.

Yunus, F. 2004. *Pendidikan Berbasis Realitas*. Yogyakarta. Logung Pustaka.

Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Ar-ruzz Media Group.



**Lampiran 2: Biodata Peneliti**

**Biodata Peneliti**

**A. Identitas Diri**

- 1 Nama Lengkap (dengan Gelar) : Deditiani Tri Indrianti., S.Pd., M.sc
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Jabatan Fungsional : Asisten ahli
- 4 NIP/NIK/Identitas Lainnya :197905172008122003
- 5 NIDN : 0017057912
- 6 Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 17Mei 1979
- 7 Email : [Indrianti\\_pkp@yahoo.co.id](mailto:Indrianti_pkp@yahoo.co.id)
- 8 No. Telepon/HP : 08124986248
- 9 Pangkat / Golongan : Asisten Ahli/ IIIa
- 10 Alamat Kantor : Jln. Kalimantan NO. 37 Kampus  
Tegal Boto Jember
- 11 No Telpon/ faks 0331 334988
- 12 Lulusan yang dihasilkan S1= 35 Orang
- 13 Mata Kuliah yang diampu
  1. Pendidikan Orang Dewasa
  2. Evaluasi keberhasilan program keaksaraan
  3. Perubahan social dan pembangunan
  4. Pengembangan Sumberdaya Manusia
  5. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
  6. Psikologi Belajar Orang Dewasa
  7. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jember	Universitas Gadjah Madah	
Bidang Ilmu	Pendidikan Luar Sekolah	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	
Tahun Lulus	2003	2010	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Kontribusi Pendidikan alternatif dalam Membina dan Mengembangkan nilai-nilai Kepribadian Anak	Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Program Pembangunan	
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. H. Suekamto Irch	Dr. Agr. Sri Peni Wastutiningsih	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2009	Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Penguatan Lembaga Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di	DIKTI	78.1
2	2010	Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Penguatan Lembaga Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di	DIKTI	55
3	2010	Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keaksaraan Fungsional Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember	PNFI	23.24
4	2012	Pola Interaksi Stakeholders dan Strategi Kebijakan Publik yang Deliberatif Untuk Pengelolaan Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Lumajang	DIKTI	86

5	2013	Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keaksaraan Fungsional Berbasis Kelembagaan Lokal Pada Perempuan Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan Kopi di Kabupaten Jember	Hibah Penguatan (BOPTN)	36
---	------	---	-------------------------	----

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Pelatihan cipta syair dan lagu bagi guru PAUD se Kabupaten Bondowoso	Mandiri	9

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/ Tahun
1	Reproduksi Kuasa Perempuan dalam Program Pembangunan	Percikan pemikiran untuk Indonesia baru	9786028627061

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Forum Rembug Nasional	Reproduksi Kuasa Perempuan dalam Program Pembangunan	13 Maret 2009 UGM, Yogyakarta
2	International Seminar	Pendidikan Keaksaraan Fungsional Berbasis Gender Mainstreaming dalam Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan	18 Januari 2014, Universitas Jember

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

**H. Perolehan HKI Dalam 5 Tahun**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	NoP/ID
1				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ dalam 5 Tahun Terakhir  
Rekayasa Sosial lainnya**

No	Judul/ Tema / Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah diTerapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
1	Model Penyelenggaraan Pembelajaran Inquiry di Pos PAUD	2010	BPPNFI Reg II Surabaya	Adanya pelatihan bagi guru PAUD untuk

**J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan Penelitian Dosen Pemula

Jember, 10 November 2014



Deditiani Tri Indrianti., S.Pd.,M.Sc  
NIP.197905172008122003